

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Intisari	vi
<i>Abstract</i>	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pertanyaan Penelitian	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Batasan Penelitian	4
1.5.1. Fokus	4
1.5.2. Lokasi	5
BAB II KISI-KISI TEORI	6
2.1. Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Kampung	6
2.2. Perumahan Layak Huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.....	9
2.3. Pemerintah Daerah dan Urusan Perumahan.....	10
2.4. Inovasi	12
2.5. Inovasi dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Daerah.....	13
2.6. Penghargaan Adiputera Puritama Tahun 2014.....	16
2.7. Program Permukiman Kota Bandung yang Dinilai Dalam Penghargaan Adiputera Puritama Tahun 2014	18
2.8. Penarikan Kisi-Kisi Teori untuk Penelitian	19

BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Pendekatan Penelitian	21
3.2. Unit Amatan dan Unit Analisis	22
3.2.1. Unit Amatan	22
3.2.2. Unit Analisis.....	22
3.3. Alat Penelitian.....	23
3.4. Cara dan Langkah Pengumpulan Data.....	23
3.4.1. Data Primer.....	23
3.4.2. Data Sekunder	25
3.5. Teknik Analisis Data.....	25
3.6. Kerangka Penelitian	25
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	27
4.1. Sejarah Kota Bandung.....	27
4.2. Konteks Kota Bandung dalam Provinsi Jawa Barat	29
4.3. Gambaran Umum Kota Bandung.....	30
4.3.1. Kependudukan.....	30
4.3.2. Tata Guna Lahan	32
4.4. Deskripsi Permukiman Kota Bandung.....	34
4.5. Deskripsi Lokasi Program Permukiman yang Menjadi Inovasi Dalam Menyelesaikan Permukiman Kumuh.....	38
4.5.1. Deskripsi Lokasi Program Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Permukiman Padat Penduduk Di Babakan Ciamis	38
4.5.2. Deskripsi Lokasi Program Penataan Kawasan Permukiman Padat Penduduk di Sempadan Sungai Cidurian di Babakan Surabaya	41
4.5.3. Deskripsi Lokasi Program Apartemen Rakyat dan Revitalisasi Kawasan “Membangun Tanpa Menggusur” di Babakan Siliwangi	45
BAB V HASIL PENELITIAN	51
5.1. Inovasi Dalam Program Penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Babakan Ciamis	51
5.1.1. Inisiasi Program dan Desain Taman Langsung Walikota Bandung Sendiri	52

5.1.2. Walikota Bandung Menekankan dan Mengharuskan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya selaku Pelaksana Program untuk Berkolaborasi Penuh dengan Masyarakat.....	54
5.1.3. Program Penataan PSU Diintegrasikan dengan ‘Gerakan Sejuta Biopori’ dan ‘Gerakan Pungut Sampah’	55
5.1.4. Dalam Keseluruhan Prosesnya, Dilakukan Kolaborasi yang Kuat Antara Pemerintah (Walikota, Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya) dan Masyarakat (Karang Taruna RW 03 dan Masyarakat Umum Babakan Ciamis) dengan Prinsip Gotong-Royong	56
5.1.5. Pembangunan Taman Walaupun Skala Kecil di Kampung, Namun Dilengkapi dengan Sumur Resapan dan Lubang Biopori	58
5.1.6. Hasil atau Keberadaan Taman Sangat Efektif sebagai Ruang Berkegiatan Bersama dan Berhasil Meningkatkan Modal Sosial Masyarakatnya.....	59
5.1.7. Dampak Keberadaan Taman Memicu Peningkatan Lingkungan di Sekitarnya (Perbaikan Rumah, Pengadaan Pot Swadaya, Menjaga Kebersihan)	63
5.1.8. Dampak Keberadaan Taman Memunculkan Rasa Memiliki (<i>Sense of Belonging</i>) Masyarakatnya, Sehingga Keberlanjutan Perawatan Taman Dilakukan oleh Masyarakatnya Sendiri	65
5.1.9. Dampak Keberadaan Taman Mampu Meningkatkan Pembelajaran Kolaborasi dan Konsensus Pada Kegiatan-Kegiatan Setelah Program Penataan PSU di Babakan Ciamis.....	66
5.2. Inovasi Dalam Program Penataan Kawasan Permukiman Padat Penduduk Sempadan Sungai Cidurian di Babakan Surabaya.....	68
5.2.1. Program Digagas Sebagai Bentuk Insentif dan Apresiasi dari Keberadaan Komunitas Punggawa Cidurian yang Sudah Proaktif Membersihkan Lingkungan, Komunitas Ini Sangat Berperan dan Fungsional	69
5.2.2. Walikota Bandung Menginisiasi Langsung Pembangunan Taman Bermain di atas Sungai Cidurian dalam Program	72
5.2.3. Walikota Bandung Turun ke Lapangan untuk Berkomunikasi Secara Langsung dengan Masyarakat dan Sikap yang “Memotong” Alur Birokrasi dalam Monitoring Program	73

5.2.4. Kolaborasi yang Sangat Baik Antara Pemerintah Kota Bandung (Walikota dan Distarcip) dengan Komunitas Punggawa Cidurian serta Masyarakat Babakan Surabaya	75
5.2.5. Pendelegasian Penuh oleh Pemerintah Kota Bandung Terhadap Peran Komunitas Punggawa Cidurian dalam Perbaikan Rumah, sehingga Jumlah Rumah yang Berhasil Diperbaiki Melebihi Target.....	77
5.2.6. Adanya Sikap Gotong-Royong yang Kuat dari Masyarakat Babakan Surabaya dalam Proses Implementasi Pembongkaran Bangunan Liar dan Perbaikan Rumah.....	80
5.2.7. Dibangunnya Taman Bermain di atas Sungai Cidurian yang Menjadi Hal Baru di Kota Bandung atau di Daerah Lainnya, Terlebih Berada di Kawasan Permukiman Kumuh.....	81
5.2.8. Hasil Program Menjadikan Daerah Babakan Surabaya sebagai Kawasan Percontohan dalam Penataan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai (Kebersihan Sungai, Akses Jalan dan Penerangan, Kualitas Hunian, Sanitasi, dan Keasrian).....	82
5.2.9. Program Memiliki Dampak Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan, sehingga Keberlanjutan Program Terjaga oleh Masyarakat Babakan Surabaya Sendiri.....	86
5.2.10. Dampak dari Proses Program yang Telah Dilaksanakan Menjadikan Kualitas Kelembagaan Komunitas Punggawa Cidurian Meningkatkan, Bahkan Ketuanya Diangkat Menjadi Komunitas Skala Kota (Komunitas Informasi Masyarakat)	88
5.3. Inovasi Dalam Program Apartemen Rakyat dan Revitalisasi Kawasan “Membangun Tanpa Menggusur” di Babakan Siliwangi	89
5.3.1. Diintegrasikannya Tiga Program Dalam Satu Kesatuan dengan Konsep <i>Rolling Stock</i> (Program Revitalisasi Babakan Siliwangi, Program Perbaikan Rusunawa Sadang Serang, dan Program Apartemen Rakyat)..	90
5.3.2. Walikota Bandung Sebagai Inisiator Konsep Apartemen Rakyat dan Mengkawal Langsung Desain Rincinya.....	91
5.3.3. Dalam Menggagas Program, Pemerintah Kota Bandung Mewujudkan Keselarasan dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	94
5.3.4. Dalam Gagasan dan Rencana, Pemerintah Kota Bandung Telah Memikirkan Aspek Keberlanjutan Program dalam Skala Tujuan yang Lebih Besar (Menyeluruh se-Kota Bandung).....	96

5.3.5. Walikota Bandung Berkomunikasi Langsung kepada Penghuni Permukiman Kumuh Ilegal (Squatter) di Babakan Siliwangi untuk Direlokasi	98
5.3.6. Dalam Persiapan Konsep Apartemen Rakyat, Telah Dilakukan Workshop Antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lain, Perbankan, dan BUMN	100
5.3.7. Konsep Apartemen Rakyat Telah Dipresentasikan kepada Wakil Presiden serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Diwacanakan sebagai Percontohan Bagi Daerah Lainnya	101
5.3.8. Adanya Kesepakatan antara Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya dengan TNI penghuni Kawasan Paldam yang Dijadikan Apartemen Rakyat bahwa TNI akan Dipindahkan ke Apartemen Rakyat	102
5.3.9. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam Pengkajian untuk Menghindari Spekulasi Apartemen Rakyat.....	102
5.3.10. Konsep Apartemen Rakyat Merupakan Konsep Baru dalam Penyediaan Permukiman Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	103
5.3.11. Apartemen Rakyat Dapat Dijangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Kisaran Harga 40-45 Juta Rupiah dengan Strategi Penggunaan Lahan Milik Pemkot, Kerjasama dengan Swasta, Sistem Subsidi Silang, dan Pencampuran Hunian-Komersial	104
5.4. Diskusi Teoritis dan Diskusi Temuan Inovasi Antar Unit Amatan	109
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	125
6.1. Kesimpulan	125
6.2. Saran	127
6.2.1. Saran Bagi Pemerintah Kota Bandung.....	127
6.2.2. Saran Pembelajaran bagi Daerah Lain	128
6.2.3. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya	130
Daftar Pustaka	131
Lampiran	134